



Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11 B Jakarta Selatan 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak melalui Surat, Tatap Muka dan Website

No. SK : 26 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat: a. Menyampaikan permasalahan melalui surat yang telah ditandatangani; b. Bagi Badan Hukum/Instansi surat harus menggunakan Kop surat dan distempel/ditandatangani secara elektronik.
2. Tatap Muka: a. Memiliki alamat e-mail; b. Memiliki tanda pengenal (KTP/SIM/Kartu Pegawai/Paspor); c. Memiliki nomor telepon; dan d. Mengisi formulir.
3. Website: Memiliki akun di konsultasi.lkpp.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat: 1. Penerima layanan menyampaikan surat resmi kepada Kepala LKPP/ Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa/ Direktur Advokasi Pemerintah Pusat/ Direktur Advokasi Pemerintah Daerah/ Direktur Penanganan Permasalahan Hukum; 2. Surat jawaban disampaikan kepada penerima layanan.
2. Tatap Muka: 1. Tamu mendatangi kantor LKPP untuk menyampaikan konsultasi/pertanyaan terkait Pengadaan Barang/Jasa dengan sebelumnya mengisi formulir layanan dalam Aplikasi E-advokasi atau mengisi kertas formulir konsultasi. 2. Sekretariat pelayanan menerima formulir permohonan konsultasi dan menyampaikannya ke pegawai yang diberi kewenangan sesuai dengan jenis pelayanan. 3. Pegawai yang diberi kewenangan menerima dan menelaah formulir permohonan konsultasi kemudian menemui pihak terkait. 4. Melakukan konsultasi (pemberian saran, pendapat dan rekomendasi) terhadap permasalahan yang disampaikan. 5. 1) Stakeholder menerima masukan, saran, dan Rekomendasi 2) Pegawai yang diberi kewenangan memasukan saran, pendapat dan rekomendasi ke dalam Aplikasi E- advokasi.
3. Website: 1. Pemohon membuka Sistem Pelayanan Konsultasi LKPP (Aplikasi E-advokasi) kemudian memilih menu sesuai permasalahan dan menulis menginput permasalahan, jika terdapat data pendukung maka pemohon dapat mengunggah file tersebut dalam Aplikasi E-advokasi, selanjutnya mengirim permasalahan tersebut ke dalam Aplikasi E-advokasi LKPP. 2. Petugas Layanan/Staf membuka Aplikasi E-advokasi, membaca pertanyaan dan memproses jawaban sesuai dengan prosedur dan permasalahan yang disampaikan. 3. Stakeholder menerima jawaban/rekomendasi melalui e-mail.



Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11 B Jakarta Selatan 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian melalui:

1. Surat
Maksimal 15 (Lima belas) hari kerja setelah surat diterima Direktur.
2. Tatap Muka
Maksimal 1 (satu) jam/sesuai dengan permasalahan yang dikonsultasikan
3. Website:
Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat: Surat jawaban yang berisi saran/pendapat/rekomendasi dan/atau tindakan koreksi, Tatap Muka: Jawaban Konsultasi berupa Saran/Pendapat/Rekomendasi dan atau Tindakan Koreksi secara lisan, Website: Jawaban Konsultasi melalui Website berupa Saran, Pendapat, Rekomendasi, dan Tindakan Koreksi.

Pengaduan Layanan



Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11 B Jakarta Selatan 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Pengaduan, Saran dan Masukan akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan diterima yang dapat disampaikan melalui:

1. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon:
 - a. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat: (021) 29912450 ext 0305.
 - b. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah: (021) 29912450 ext 0308.
 - c. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum: (021) 29912450 ext. 0311.
2. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email:
 - a. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat: dit.app@lkpp.go.id dengan subjek "Pengaduan Layanan Konsultasi Pra Kontrak Pusat"
 - b. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah: dit.apd@lkpp.go.id dengan subjek "Pengaduan Layanan Konsultasi Pra Kontrak Daerah"
 - c. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum: helpdesk.pph@lkpp.go.id dengan subjek "Pengaduan Layanan Konsultasi Pasca Kontrak"
3. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada:
Direktur Advokasi Pemerintah Pusat/
Direktur Advokasi Pemerintah Daerah/
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta
Selatan 12940